

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi desa-desa di Indonesia, SDGs Desa benar-benar dibutuhkan. Bahkan, Program SDGs ini menjadi sumber utama untuk membantu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka menengah). SDGs teruji memudahkan pengukuran pembangunan. SDGs teruji memudahkan pengukuran pembangunan. Pengukuran program ini mengacu pada aspek atau fenomena yang ada di lingkungan masyarakat desa dengan berbagai bentuk aspek dan unsur yang mendukung. Jadi, SDGs ini sangat membantu untuk keberlangsungan pembangunan terutama pada tingkat unit yang terendah.

Untuk mempermudah pengukuran dan komunikasi untuk sumber informasi, maka julukan yang tepat untuk hal ini ialah program SDGs Desa yang telah ada sebelum tahun 2023. Ringkasan dan pemilihan tema yang tepat yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sehingga bisa di cerna dengan masyarakat dengan konsep yang familiar di lingkungan desa. Tambahan kata “Desa” merujuk pada pembangunan desa, yang benar-benar berwujud pembangunan pada level desa, yang bisa dirumuskan sendiri pada masing-masing desa, melalui data-data spesifik SDGs Desa, bukan data pinjaman dari luar desa. Data yang tersedia dari perorangan/individu, RT, dan keluarga sangat penting untuk pengumpulan dan perumusan data untuk program ini seperti data pendapatan dari ekonomi masyarakat. Hal ini berguna dikarenakan beragamnya sumber ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu bentuk nilai tambah dalam penyajian data. Ini semua bagian dari tujuan guna mengembangkan pembangunan dalam konsep menjadi lebih di perkecil, lebih lokal, level desa, langsung kepada warga, dengan prioritas utama yaitu pendekatan secara partisipatoris, yang praktis untuk digunakan, sehingga warga desa cepat memperoleh manfaatnya.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh PBB pada tahun 2015 merupakan komitmen global untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk seluruh dunia. Tujuan SDGs mencakup 17 target, yang mencakup berbagai aspek seperti

kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. 17 tujuan dari SDGs tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015- 2019 maupun 2020-2024. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan SDGs, karena desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan dan memiliki potensi besar dalam pengembangan berkelanjutan. Namun, pemerintah desa seringkali menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan karena keterbatasan sumber daya, kapasitas SDM yang terbatas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi krusial karena IDM memberikan kerangka yang terstruktur untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan di tingkat desa. Melalui IDM, pemerintah desa dapat mengidentifikasi area-area prioritas yang memerlukan perbaikan, seperti akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan, sesuai dengan target-target SDGs. Dengan data yang terkumpul dari IDM, pemerintah desa dapat mengembangkan strategi yang lebih terukur dan spesifik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Rupert. Rekapitulasi Desa/Kelurahan, Total Penduduk, Status IDM, tahun 2023 Terlihat pada berikut ini:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Desa/Kelurahan, Total Penduduk, Status IDM, tahun 2023

No	Nama Wilayah	Kelurahan/Desa	Status IDM
1	Batu Panjang	Kelurahan	-
2	Pergam	Kelurahan	-
3	Terkul	Kelurahan	-
4	Tanjung Kapal	Kelurahan	-
5	Sungai Cingam	Desa	Mandiri
6	Teluk Lecah	Desa	Mandiri
7	Makeruh	Desa	Maju
8	Hutan Panjang	Desa	Maju
9	Pangkalan Nyirih	Desa	Mandiri
10	Sukarjo Mesim	Desa	Mandiri
11	Darul Aman	Desa	Maju
12	Parit Kebumen	Desa	Mandiri
13	Sri Tanjung	Desa	Maju
14	Pancur Jaya	Desa	Mandiri

No	Nama Wilayah	Kelurahan/Desa	Status IDM
15	Pangkalan Pinang	Desa	Maju
16	Dungun Baru	Desa	Maju

Sumber : Sidkemendesa, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Indeks Desa Membangun bagi program SDGs adalah menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan di tingkat desa secara komprehensif, memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi yang lebih tepat dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs dengan memprioritaskan area-area yang memerlukan perbaikan secara spesifik. SDGs Desa ialah program untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa peduli kesehatan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, serta Desa tanggap akan budaya yang berguna percepatan pencapaian SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?)

Development Goals Desa akan diproyeksikan sebagai role pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030 mendatang. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 memulai untuk berfokus pada SDGs desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs. Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 ini dilatar belakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. <https://blog.olahkarsa.com/apa-itu-sdgs-desa/>.

Menurut Angga Natalia dan Erine Nur Maulidya (2022) Indonesia termasuk dari 193 negara yang hadir pada penandatanganan SDGs pada sidang

PBB tahun 2015 dan program ini di adopsi Indonesia sebagai bentuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2015. Pada kesempatan itu Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla mewakili Indonesia sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan SDGs. Di saat yang bersamaan juga sedang diadakan rapat kabinet Indonesia yang menghasilkan beberapa ketetapan yaitu mempersiapkan draft dokumen kerangka hukum bagi pelaksanaan SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Tahun selanjutnya pemerintah termasuk Presiden Indonesia mulai melakukan penyusunan kerangka hukum bagi pelaksanaan SDGs yang dimana kerangka tersebut berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

Tahun 2017 kerangka hukum yang pada tahun sebelumnya telah rampung dan ditandatangani oleh Presiden Indonesia. Hasil kerangka hukum tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut SDGs disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mana dokumen tersebut memuat tujuan dan sasaran global dari tahun 2016 sampai tahun 2030. Kecamatan Rupal, sebagai bagian dari Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Indonesia, menghadapi tantangan yang unik dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi landasan utama bagi pemerintah desa untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

SDGs tidak hanya menggarisbawahi pentingnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga menekankan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan sistem pendidikan dan kesehatan. Di Kecamatan Rupal, pemerintah desa berperan sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat guna mengintegrasikan tujuan-tujuan SDGs ke dalam perencanaan pembangunan lokal. Hal ini melibatkan berbagai aspek mulai dari peningkatan infrastruktur dasar hingga promosi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs di Kecamatan Rupal menjadi krusial untuk mengevaluasi

efektivitas langkah-langkah yang telah diambil serta menyarankan perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna mencapai visi pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 dan di masa depan.

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Desa Di Kecamatan Rupal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemerintah desa menyesuaikan Program SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa?
2. Apa saja strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mencapai SDGs Desa?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mencapai SDGs?
4. Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membatasi yaitu:

1. Analisis ini hanya akan fokus pada pemerintah Desa Teluk Lecah dan Pancur Jaya di Kecamatan Rupal.
2. Analisis ini hanya akan mempertimbangkan strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian Program SDGs terhadap RPJM Desa.
2. Untuk mengetahui strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mencapai SDGs desa.
3. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mencapai SDGs.
4. Untuk menyusun rekomendasi untuk meningkatkan strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran yang lebih jelas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dalam mencapai SDGs desa.
2. Membantu pemerintah desa untuk mengevaluasi strategi yang telah dilakukan dan meningkatkan efektivitas strategi yang digunakan.
3. Membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi tantangan dalam mencapai SDGs.
4. Menjadi sumber data yang dapat direkomendasikan dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan SDGs desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lokasi atau tempat penelitian yaitu pada Desa di Kecamatan Rupert. Dalam bab ini di uraikan jawaban dari rumusan masalah dan Analisis Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Di Kecamatan Rupert.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan pada bab ini menerangkan tujuan dan hasil akhir dari penelitian yang telah diangkat.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN